

Praktik Kekuasaan: Studi Analisis Wacana Terhadap Pidato Megawati Soekarno Putri

Rut Yemima Sitorus¹, Rindy Any Br Tarigan², Deby Yanti Nahampun³,
Friska Yani Natalia Hutasoit⁴

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Medan,
Medan, Indonesia^{1,2,3,4}

Email Korespodensi: rutyemima07@gmail.com

Sejarah Artikel:

Diterima 04-06-2025
Disetujui 05-06-2025
Diterbitkan 07-06-2025

ABSTRACT

This study aims to reveal the practice of power in Megawati Soekarnoputri's political speech through the Critical Discourse Analysis (AWK) approach of Norman Fairclough's model. In a democratic society, political speeches are not only a medium for conveying ideas, but also a tool for reproducing ideology and legitimizing power. The data source in this study is the text of Megawati's speech at the 2025 Trisakti Tourism Award event. The method used is qualitative descriptive with listening, note-taking, and documentation techniques. The analysis was carried out based on Fairclough's three dimensions: textual, discursive praxis, and social dimensions. The results of the study show that Megawati's speech contains various linguistic strategies such as the use of pronouns, ideological diction, repetition, and historical symbols to build a self-image as a moral and nationalist leader. In practice, the speech was produced in the context of post-2024 Election politics, representing the party's institutional voice, and disseminated through the media to expand its influence. Socially, this speech affirms ideological hegemony that combines nationalism, populism, and women's identity in politics. Thus, this study confirms that political discourse is an important arena in the struggle for meaning and reproduction of power.

Keywords: *Critical Discourse Analysis, political speech, Megawati Soekarnoputri, power, ideology*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap praktik kekuasaan dalam pidato politik Megawati Soekarnoputri melalui pendekatan Analisis Wacana Kritis (AWK) model Norman Fairclough. Dalam masyarakat demokratis, pidato politik tidak hanya menjadi media penyampaian gagasan, tetapi juga alat reproduksi ideologi dan legitimasi kekuasaan. Sumber data dalam penelitian ini adalah teks pidato Megawati pada acara Trisakti Tourism Award 2025. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik simak, catat, dan dokumentasi. Analisis dilakukan berdasarkan tiga dimensi Fairclough: dimensi tekstual, praksis diskursif, dan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidato Megawati mengandung berbagai strategi linguistik seperti penggunaan pronomina, diksi ideologis, repetisi, dan simbol historis untuk membangun citra

diri sebagai pemimpin bermoral dan nasionalis. Secara praksis, pidato tersebut diproduksi dalam konteks politik pasca-Pemilu 2024, merepresentasikan suara institusional partai, dan disebarakan melalui media untuk memperluas pengaruhnya. Secara sosial, pidato ini menegaskan hegemoni ideologis yang menggabungkan nasionalisme, populisme, dan identitas perempuan dalam politik. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa wacana politik merupakan arena penting dalam perebutan makna dan reproduksi kekuasaan.

Kata Kunci: Analisis Wacana Kritis, pidato politik, Megawati Soekarnoputri, kekuasaan, ideologi

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Rut Yemima Sitorus, Rindy Any Br Tarigan, Deby Yanti Nahampun, & Friska Yani Natalia Hutasoit. (2025). Praktik Kekuasaan: Studi Analisis Wacana Terhadap Pidato Megawati Soekarno Putri. CARONG: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora, 1(4), 765-775. <https://doi.org/10.62710/86a1xr82>

PENDAHULUAN

Dalam masyarakat demokratis, bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai instrumen kekuasaan. Melalui bahasa, seorang aktor politik tidak hanya menyampaikan gagasan, tetapi juga membentuk realitas sosial, membingkai wacana, dan memengaruhi opini publik. Pidato politik, sebagai bentuk komunikasi strategis, merupakan arena di mana praktik kekuasaan direproduksi, dinegosiasikan, dan dilestarikan. Oleh karena itu, analisis wacana terhadap pidato politik menjadi penting untuk membongkar lapisan-lapisan makna yang tersembunyi di balik struktur bahasa yang tampak netral.

Salah satu tokoh sentral dalam politik Indonesia yang pidatonya sering menjadi sorotan publik adalah Megawati Soekarnoputri. Sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan tokoh yang memiliki warisan historis dari Presiden Soekarno, setiap pernyataan publik Megawati sarat dengan muatan ideologis, simbolik, dan politis. Pidatonya tidak hanya mewakili suara personal, melainkan juga suara institusional yang memiliki pengaruh luas dalam konstelasi kekuasaan nasional.

Dalam pidatonya pada acara malam Penganugerahan Trisakti Tourism Award 2025, Megawati membahas isu-isu strategis nasional dengan gaya retorik yang khas, mencampurkan refleksi personal, kritik implisit terhadap lawan politik, serta rujukan moral yang bersifat universal, seperti kenangan terhadap Paus Fransiskus. Megawati juga mengungkit mengenai Pemilu 2024. Penggunaan gaya bahasa mencerminkan upaya untuk memposisikan diri sebagai figur pemersatu sekaligus pemegang otoritas moral dan ideologis. Namun di sisi lain, terdapat strategi diskursif yang mencerminkan relasi kuasa antara dirinya dengan elemen lain dalam sistem politik.

Analisis Wacana Kritis (AWK), khususnya pendekatan Norman Fairclough, menjadi kerangka teoritis yang relevan untuk mengkaji bagaimana pidato ini membangun dan memelihara praktik kekuasaan. AWK memandang wacana sebagai praktik sosial yang sarat ideologi, dan oleh karena itu harus dianalisis tidak hanya dari struktur linguistik, tetapi juga dari konteks sosial dan institusionalnya. Dengan pendekatan ini, kita dapat mengungkap bagaimana Megawati merepresentasikan dirinya, lawan politiknya, dan rakyat, serta bagaimana narasi tertentu disebarluaskan untuk mendukung posisi politik tertentu.

Bahasa dalam pidato Megawati bukan sekadar alat netral, melainkan medium yang sarat kepentingan. Pilihan diksi, penggunaan pronomina, repetisi, hingga struktur kalimat menjadi indikator bagaimana kekuasaan dibentuk dan dipertahankan. Dalam konteks demokrasi yang tengah mengalami tantangan serius, pidato-pidato seperti ini menjadi penting untuk dibedah secara kritis agar tidak menutupi mekanisme dominasi yang berlangsung secara simbolik.

Kajian ini juga penting untuk memahami bagaimana aktor politik perempuan seperti Megawati menggunakan otoritasnya dalam sistem yang masih didominasi oleh praktik patriarki. Sebagai satu-satunya presiden perempuan dalam sejarah Indonesia, Megawati berada dalam posisi unik, ia harus memainkan peran ganda sebagai simbol kekuasaan dan sekaligus objek resistensi publik. Pidatonya dapat dibaca sebagai respons terhadap tekanan tersebut, sekaligus upaya untuk mendefinisikan ulang batas-batas kuasa perempuan dalam politik nasional.

Studi ini tidak hanya mengungkap strategi retorik dalam teks pidato Megawati, tetapi juga bagaimana wacana tersebut beroperasi dalam lanskap politik pasca-Pemilu 2024. Dengan situasi politik yang penuh ketegangan dan transisi kekuasaan yang menimbulkan polemik, setiap kata dalam pidato tokoh kunci seperti Megawati mengandung bobot yang dapat memperkuat atau menggoyang legitimasi politik yang ada. Oleh karena itu, penting untuk menelusuri bukan hanya apa yang dikatakan, tetapi juga bagaimana dan mengapa hal itu dikatakan.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik kekuasaan dalam pidato Megawati

menggunakan pendekatan Analisis Wacana Kritis. Fokus utamanya adalah membongkar relasi kuasa yang tersembunyi di balik struktur wacana, serta mengidentifikasi bagaimana kekuasaan direproduksi melalui narasi, simbol, dan ideologi yang dibawa dalam teks pidato. Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman tentang dinamika kekuasaan dalam diskursus politik Indonesia kontemporer.

Konsep wacana dalam kajian kritis tidak semata-mata dipahami sebagai bahasa dalam konteks linguistik, melainkan sebagai praktik sosial yang membentuk dan dibentuk oleh kekuasaan. Dalam perspektif analisis wacana kritis, wacana dianggap sebagai bentuk representasi kekuasaan yang tersembunyi. Melalui analisis yang mendalam, aspek-aspek kekuasaan tersebut dapat diungkapkan secara lebih jelas dan terbuka (Blommaert dan Bulcaen dalam Pratiwi dan Rahmawati, 2023:121). Setiap ujaran atau teks tidak pernah netral, karena ia merefleksikan ideologi, kepentingan, dan posisi sosial penuturnya. Dalam konteks pidato politik, wacana menjadi arena utama di mana aktor politik membongkar realitas dan mereproduksi hegemoni.

Sejalan dengan pendapat Guy Cook (dalam Miranti, 2021:268), analisis wacana juga mencakup kajian terhadap konteks komunikasi, seperti siapa yang terlibat dalam komunikasi, kepada siapa pesan disampaikan, dan untuk tujuan apa. Selain itu, analisis ini mempertimbangkan jenis audiens, situasi komunikasi, media yang digunakan, ragam perkembangan komunikasi, serta hubungan antara pihak-pihak yang terlibat. Sejalan dengan hal ini, Fillmore menekankan pentingnya konteks dalam menentukan makna suatu ujaran. Perubahan konteks dapat menyebabkan pergeseran makna dari ujaran tersebut.

Analisis wacana kritis memandang bahasa sebagai elemen yang sangat penting, khususnya dalam mengungkap bagaimana ketimpangan kekuasaan terjadi di masyarakat melalui penggunaan bahasa. Oleh sebab itu, pendekatan ini digunakan untuk mengungkap kekuasaan yang tersembunyi dalam setiap proses berbahasa, seperti aturan-aturan mengenai apa yang boleh dibicarakan, sudut pandang yang harus digunakan, serta tema yang diangkat. Dengan cara pandang ini, wacana selalu dipahami sebagai sesuatu yang tidak lepas dari relasi kekuasaan, terutama dalam hal pembentukan identitas subjek dan berbagai bentuk representasi sosial dalam masyarakat (Miranti 2022).

Fairclough (Purba dan Rahmadani, 2024:2187) mengemukakan bahwa pendekatan analisis wacana kritis terdiri dari tiga dimensi utama, yaitu:

1. Dimensi tekstual, yang menitikberatkan pada analisis struktur bahasa dalam teks, seperti pilihan kosakata, susunan kalimat (sintaksis), dan gaya penulisan, guna memahami bagaimana bahasa membentuk makna serta mempengaruhi cara pandang pembaca;
2. Dimensi praksis, yang mengkaji konteks sosial dan praktik komunikasi saat teks diproduksi dan diterima, termasuk dalam hal relasi kekuasaan dan ketimpangan sosial, serta bagaimana bahasa digunakan untuk mempertahankan atau menantang struktur kekuasaan yang berlaku;
3. Dimensi sosial, yang fokus pada keterkaitan antara bahasa dan ideologi, terutama dalam hal bagaimana bahasa berperan dalam mempertahankan atau mengubah nilai dan norma sosial yang dominan. Fairclough menekankan pentingnya mengkaji peran wacana dalam mencerminkan serta memperkuat ketimpangan sosial, dan bagaimana bahasa dapat menjadi alat pemberdayaan maupun penindasan terhadap kelompok-kelompok tertentu.

Fairclough (dalam Ikhsan, 2022:220) memandang bahwa terdapat hubungan dialektis antara wacana dan praktik sosial, yang merupakan salah satu ciri khas dari analisis wacana kritis yang ia kembangkan. Lima ciri utama dalam pandangan ini meliputi:

1. Praktik wacana turut membentuk realitas sosial, termasuk dalam proses perubahan sosial budaya
2. Wacana memiliki struktur tertentu yang bersifat menetapkan, dan terdapat hubungan timbal balik

antara wacana dan praktik sosial

3. Penggunaan bahasa selalu terkait dengan konteks sosialnya
4. Praktik wacana berperan dalam membangun serta memelihara relasi kekuasaan
5. Analisis wacana kritis diposisikan sebagai pendekatan kritis yang berpihak pada perubahan sosial serta mendukung kelompok-kelompok sosial tertentu.

Dalam kerangka analisis wacana kritis, wacana dipahami sebagai bentuk representasi kekuasaan yang kerap tersembunyi atau tidak secara eksplisit terlihat. Melalui pendekatan ini, analisis mendalam terhadap wacana memungkinkan terungkapnya elemen-elemen kekuasaan yang selama ini tersembunyi dalam struktur bahasa dan praktik diskursif. Analisis wacana kritis memandang bahwa proses pemberian makna (*semiosis*) tidak berdiri sendiri, melainkan dibentuk dan dipengaruhi oleh elemen-elemen sosial seperti relasi kekuasaan, institusi, struktur sosial, dan nilai-nilai budaya yang dominan. Oleh karena itu, tujuan utama pendekatan ini adalah untuk menelusuri dan mengungkap hubungan antara *semiosis* dengan praktik sosial yang melingkupinya.

Salah satu tokoh penting dalam pengembangan analisis wacana kritis, yaitu Norman Fairclough, menjelaskan bahwa tatanan wacana terdiri atas dimensi semiosis yang saling terkait dengan praktik sosial, dan ketiganya terwujud melalui tiga aspek utama, yakni: genre (sebagai cara bertindak atau melakukan sesuatu), wacana (sebagai cara merepresentasikan realitas), dan gaya (sebagai cara membentuk identitas atau menjadi diri sendiri). Ketiga aspek ini tidak hanya termanifestasi dalam struktur teks, tetapi juga menjadi perangkat ideologis yang memungkinkan pengaruh kekuasaan disampaikan dan diterima secara halus oleh masyarakat (Ren dalam Pratiwi, 2023:121).

Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana pengetahuan dibentuk dan disebarkan melalui komunikasi. Individu yang memahami proses pembentukan pengetahuan memiliki kemampuan untuk mentransformasikan pengetahuan personalnya menjadi pengetahuan kolektif melalui interaksi sosial. Akan tetapi, proses komunikasi tidak bersifat satu arah. Penerima pesan bukanlah entitas pasif; mereka secara aktif menginterpretasikan pesan berdasarkan kerangka pengetahuan yang telah mereka miliki sebelumnya. Hanya pesan yang sesuai atau selaras dengan kerangka pengetahuan tersebut yang kemudian dapat diterima dan diinternalisasi menjadi pengetahuan baru.

Proses transformasi pengetahuan inilah yang dapat mengarah pada terbentuknya ideologi. Ketika realitas direpresentasikan melalui simbol-simbol yang disesuaikan dengan kepentingan kekuasaan kelompok tertentu, maka pengetahuan yang semula bersifat netral dapat berubah menjadi alat hegemonik. Dalam kerangka ini, ideologi menjadi bentuk kekuasaan yang memaksa namun tampak alami dan seolah-olah diterima begitu saja tanpa paksaan (Fuchs dalam Irdansyah, 2021:226). Inilah mengapa para propagandis sering kali menyesuaikan pesan yang mereka sampaikan dengan pengetahuan kolektif yang sudah ada di masyarakat, agar lebih mudah diterima dan diakui kebenarannya oleh publik.

Untuk memperkuat pemahaman terhadap bagaimana komunikasi memungkinkan terciptanya konsensus dan legitimasi, konsep *pragmatik universal* yang dikembangkan oleh Habermas menjadi relevan untuk dikaitkan. Habermas (dalam Irdansyah, 2021) memperkenalkan *pragmatik universal* sebagai kerangka teoritis yang bertujuan merumuskan syarat-syarat fundamental bagi terjadinya pemahaman dalam interaksi komunikasi. Ia menyatakan bahwa agar komunikasi dapat berlangsung secara efektif, terdapat sejumlah prasyarat yang harus dipenuhi: pembicara harus menyampaikan sesuatu dengan cara yang dapat dipahami secara linguistik, menyampaikan informasi yang bermakna, menjadikan dirinya dapat dipahami, dan menciptakan hubungan yang memungkinkan tercapainya pemahaman bersama.

Bagi Habermas, komunikasi bukan sekadar pertukaran informasi, melainkan sebuah proses rasional yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama berdasarkan pemahaman timbal balik, rasa saling

percaya, dan keselarasan dalam perspektif. Dalam hal ini, komunikasi berfungsi sebagai sarana kolaboratif dalam membangun struktur sosial yang adil dan legitim. Sebuah kalimat atau ujaran, menurutnya, memiliki tiga fungsi utama: mewakili realitas objektif (apa yang ada di dunia), mengungkapkan maksud atau intensi subjektif pembicara, serta membangun relasi sosial yang sah secara timbal balik. Dengan demikian, bahasa menjadi alat strategis dalam proses reproduksi sosial, ideologis, dan kekuasaan.

METODE PELAKSANAAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang berfokus pada pengumpulan data berupa penjelasan naratif, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan, yang bersumber dari individu dan perilaku yang diamati secara langsung (Putri dalam Anggraini, 2019). Secara umum, penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam terhadap berbagai fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, atau tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menggambarkan dan memahami secara mendalam makna-makna yang terkandung dalam teks pidato Megawati Soekarnoputri, khususnya dalam konteks praktik kekuasaan yang direpresentasikan melalui bahasa.

Penelitian ini berfokus pada analisis wacana kritis (AWK) dengan menggunakan model yang dikembangkan oleh Norman Fairclough. Fairclough membagi analisis wacana menjadi tiga dimensi utama, yaitu dimensi tekstual, dimensi praktik diskursif, dan dimensi praktik sosial. Dimensi tekstual mencakup analisis atas unsur-unsur kebahasaan dalam pidato, seperti diksi, struktur kalimat, dan penggunaan pronomina. Dimensi praktik diskursif menekankan bagaimana wacana diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi oleh publik. Sementara itu, dimensi praktik sosial menganalisis hubungan antara wacana dan konteks sosial-politik yang lebih luas, termasuk ideologi dan relasi kekuasaan yang melekat dalam pidato tersebut.

Sumber data dalam penelitian ini berupa teks pidato Megawati Soekarnoputri dalam acara Trisakti Tourism Award 2025 yang ditranskrip dari media daring. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode simak dengan menggunakan teknik simak bebas libat cakap, teknik baca markah, dan teknik catat (Sudaryanto dalam Tarigan 2023:23). Adapun tahapan dalam penelitian ini, yakni langkah awal dilakukan dengan melakukan studi literatur yang berkaitan dengan judul penelitian. Selanjutnya melakukan analisis wacana kritis dengan menerapkan model Fairclough dengan tahapan analisis/mengamati video. Setelah diperoleh hasil analisis, dilakukan penarikan simpulan.

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, peneliti melakukan studi literatur guna memahami teori-teori yang relevan, khususnya terkait analisis wacana kritis model Fairclough dan konteks sosial-politik pidato. Kedua, peneliti melakukan transkripsi terhadap pidato yang dianalisis dari format audio-visual ke dalam bentuk teks tulis. Ketiga, peneliti menerapkan tiga dimensi analisis Fairclough secara sistematis untuk mengungkap bagaimana praktik kekuasaan direpresentasikan melalui wacana dalam pidato tersebut. Hasil dari analisis ini kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai relasi antara bahasa, kekuasaan, dan ideologi dalam konteks politik Indonesia kontemporer

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengungkap praktik kekuasaan yang tersembunyi dalam pidato politik Megawati Soekarnoputri, penelitian ini menggunakan pendekatan Analisis Wacana Kritis (AWK) model Norman Fairclough. Analisis dilakukan dengan memeriksa teks pidato berdasarkan tiga dimensi utama, yakni dimensi tekstual, dimensi praksis diskursif, dan dimensi sosial. Ketiga dimensi ini digunakan untuk menggali bagaimana struktur bahasa, konteks produksi dan konsumsi wacana, serta ideologi yang melekat dalam pidato digunakan untuk merepresentasikan dan mereproduksi kekuasaan. Uraian berikut menyajikan hasil analisis berdasarkan masing-masing dimensi tersebut.

1. Dimensi Tekstual: Analisis Struktur Bahasa

Pidato Megawati dalam acara Trisakti Tourism Award 2025 menunjukkan karakteristik linguistik yang kuat dalam membentuk citra diri dan menyampaikan kritik secara tersirat. Beberapa unsur kebahasaan yang menonjol antara lain:

- a. Pilihan diksi seperti “moral”, “martabat”, dan “warisan Bung Karno” mencerminkan upaya mendingkai wacana nasionalisme dan otoritas moral.
- b. Frasa "Trisakti Bung Karno": Frasa ini bukan hanya sekadar rujukan sejarah, tetapi sebuah simbol ideologis yang kuat. Penyebutan berulang menunjukkan upaya untuk menghidupkan kembali dan menegaskan relevansi gagasan proklamator dalam konteks pembangunan modern. Ini berfungsi sebagai jangkar bagi legitimasi kebijakan yang diusung.
- c. Penggunaan frasa "Pariwisata yang dinikmati oleh rakyat sendiri" secara langsung mengkontraskan pariwisata yang berorientasi pada keuntungan elit atau asing, menegaskan orientasi populis dan keadilan sosial. Ini adalah upaya untuk mengklaim narasi pariwisata sebagai alat pemberdayaan rakyat.
- d. Slogan "Solid bergerak" adalah perintah performatif dan seruan mobilisasi. Kata "solid" menunjukkan persatuan internal, sementara "bergerak" menandakan aksi nyata. Ini menunjukkan upaya untuk menggalang dukungan dan mendorong tindakan kolektif di kalangan kader dan masyarakat.
- e. Frasa “Turun ke bawah”, "akar rumput" menekankan pentingnya kedekatan dengan rakyat dan penolakan terhadap elitisme. Ini merupakan kritik implisit terhadap pihak-pihak yang dianggap jauh dari realitas masyarakat.
- f. Pernyataan “Pemegang saham tunggal PDI Perjuangan” adalah klaim otoritas absolut dalam partai. Ini bukan sekadar kepemilikan struktural, melainkan penegasan posisi kekuasaan yang tak terbantahkan, yang memungkinkannya mengarahkan partai sesuai visinya untuk "berjuang demi rakyat".
- g. Penggunaan pronomina seperti “kita”, “saya”, dan “mereka” mengimplikasikan pembagian posisi antara kelompok ‘kita’ (yang dianggap benar dan nasionalis) dan ‘mereka’ (yang dianggap sebagai lawan atau pengganggu tatanan). Selain itu, Megawati juga menggunakan kata "ibu" sebagai pengganti kata ganti orang pertama seperti "saya" atau "aku" saat merujuk pada dirinya sendiri. Kata "ibu" berfungsi sebagai nomina yang mengacu langsung kepada Megawati sebagai pembicara.
- h. Repetisi ide tentang pentingnya nilai-nilai kebangsaan dan kedaulatan rakyat menciptakan penekanan terhadap gagasan ideologis tertentu.
- i. Struktur kalimat retorik, seperti pertanyaan retorik dan kalimat perintah tidak langsung,

digunakan untuk menggugah emosi audiens dan memperkuat legitimasi diri sebagai pemimpin moral dan ideologis.

Struktur ini menunjukkan bahwa Megawati menggunakan pidato sebagai alat untuk merepresentasikan kekuasaan melalui simbol kebangsaan dan sejarah. Penggunaan kata "ibu" oleh Megawati dalam pidatonya dapat dipahami sebagai strategi linguistik untuk menegaskan otoritasnya sebagai Ketua Umum Partai.

Dalam pernyataannya, Megawati secara retorik mengulang pertanyaan "Ibumu siapa?" yang kemudian dijawab oleh audiens dengan "Bu Mega!", menunjukkan pengakuan kolektif terhadap posisinya sebagai figur sentral dan pemimpin. Penggunaan referensi diri "ibu" dalam konteks ini bukan sekadar sapaan personal, melainkan simbol kekuasaan dan pengendalian atas struktur partai. Ia menegaskan bahwa pemerintahannya sebagai ketua umum harus dijalankan, dan menunjukkan bahwa ia memiliki pengetahuan serta kendali penuh terhadap dinamika internal partai.

Kalimat-kalimat seperti "Ibu tahu lo" dan "instruksi ibu itu sebetulnya nggak susah" memperkuat posisi dirinya sebagai figur otoritatif yang pantas dipatuhi. Dengan demikian, penggunaan kata "ibu" tidak hanya berfungsi sebagai pengganti pronomina, tetapi juga sebagai penanda identitas kekuasaan dan otoritas moral dalam konteks komunikasi politik.

2. Dimensi Praksis Diskursif: Produksi dan Konsumsi Teks

Pidato ini disampaikan pasca-Pemilu 2024, yang diwarnai ketegangan politik dan pertarungan wacana antara berbagai kelompok kekuasaan. Dalam konteks ini:

- a. Produksi pidato berada dalam kerangka institusional PDI-P, yang menjadikan Megawati tidak hanya sebagai pribadi, tetapi sebagai representasi partai dan kekuatan politik nasional.
- b. Distribusi pesan dilakukan melalui media massa dan kanal digital, memperluas jangkauan wacana dan memperkuat daya resonansi simbolik.
- c. Konsumsi oleh publik tidak bersifat netral. Pendukung Megawati mengafirmasi wacana tersebut sebagai bentuk keberanian dan kejelasan sikap politik, sedangkan lawan politik mungkin melihatnya sebagai bentuk dominasi simbolik atau delegitimasi terhadap kelompok lain.

1) Produksi Wacana:

- a) Kontekstualisasi Sejarah: Pidato ini secara aktif merekontekstualisasi ideologi Bung Karno (Trisakti) ke dalam permasalahan kontemporer seperti pariwisata, kemiskinan, dan ketahanan pangan. Ini adalah upaya untuk menunjukkan bahwa solusi masa lalu masih relevan dan efektif hari ini.
- b) Respons Terhadap Realitas Politik: Pembicara menunjukkan kesadaran akan kondisi politik pasca-pemilu yang dianggap tidak mengakui kesulitan rakyat. Pidato ini berfungsi sebagai respons, mencoba menggeser narasi publik ke arah empati dan aksi nyata bagi rakyat.
- c) Peran sebagai Pemimpin Partai dan Bangsa: Pidato ini diproduksi oleh seorang pemimpin yang memiliki posisi strategis di partai dan memiliki pengalaman sebagai mantan kepala negara. Hal ini memberikan bobot dan otoritas pada setiap pernyataan. Pengalaman mengatasi krisis ekonomi masa lalu diangkat untuk membangun kredibilitas dan kepercayaan.

2) Distribusi dan Konsumsi Wacana:

- a) Target Audiens: Pidato ini jelas ditujukan untuk kader partai ("tidak hanya mejeng tapi kerja keras") dan masyarakat luas ("menolong rakyat di akar rumput"). Pesan ini dirancang untuk memobilisasi, menginspirasi, dan menegaskan kembali komitmen partai terhadap rakyat.

- b) Media Penyebaran: Sebagai pidato publik, wacana ini kemungkinan didistribusikan melalui media massa, media sosial, dan kanal internal partai, memungkinkan konsumsi oleh khalayak yang lebih luas, memperkuat pesan dan ideologi partai.
- 3) Intertekstualitas:
- a) Rujukan ke Bung Karno: Ini adalah bentuk intertekstualitas eksplisit yang paling menonjol, menghubungkan pidato ini dengan sejarah panjang perjuangan nasional dan fondasi ideologis negara.
 - b) Rujukan ke Paus Fransiskus: Meskipun di luar konteks politik langsung, penyebutan Paus sebagai "ayah dan guru" menunjukkan adanya pengaruh nilai-nilai universal seperti kasih sayang dan kepemimpinan moral, yang ingin diinternalisasi dan mungkin diproyeksikan oleh pembicara.

Dalam hal ini, pidato menjadi medium perebutan makna dalam ruang publik, yang mengindikasikan bahwa bahasa tidak pernah lepas dari praktik sosial dan kepentingan ideologis. Hal ini sesuai dengan analisis Fairclough bahwa praktik diskursif tidak netral dan selalu berada dalam arena perebutan makna dan otoritas (Purba & Rahmadani, 2024).

3. Dimensi Sosial: Ideologi dan Relasi Kekuasaan

Pidato Megawati sarat dengan narasi ideologi yang bersifat hegemonik:

- a. Penciptaan citra sebagai penjaga moral bangsa, dengan menyebut tokoh-tokoh besar seperti Bung Karno dan Paus Fransiskus, bertujuan memperkuat legitimasi moral dan simbolik dirinya.
 - b. Kritik terselubung terhadap kondisi sosial-politik, seperti "kelompok yang tidak tahu diri" atau "lupa sejarah", menjadi bentuk delegitimasi terhadap pihak oposisi tanpa penyebutan eksplisit.
 - c. Representasi perempuan dalam politik juga tersirat dalam cara Megawati menyampaikan pidatonya sebagai seorang ibu bangsa. Ini menciptakan simbol kekuasaan feminin yang berlawanan dengan citra maskulin dominan dalam politik Indonesia.
- 1) Hubungan Kekuasaan:
- a) Legitimasi Kekuasaan: Pembicara secara aktif melegitimasi posisinya dan posisi partainya melalui klaim sebagai pewaris ideologi Bung Karno dan sebagai pihak yang peduli terhadap rakyat miskin. Ini adalah strategi untuk membangun dukungan dan menegaskan hak untuk memimpin.
 - b) Kritik Kekuasaan Lain: Terdapat kritik implisit dan eksplisit terhadap "pihak-pihak yang tidak mengakui kesulitan rakyat" pasca-pemilu dan "elit yang kurang paham Indonesia". Ini adalah upaya untuk menantang dominasi narasi lain dan menegaskan posisi moral yang lebih tinggi.
 - c) Penyelenggaraan Kekuasaan: Instruksi untuk "menanam 10 tanaman", "menjaga kesuburan tanah Bali", dan "mendeportasi wisatawan asing" adalah contoh bagaimana kekuasaan direalisasikan melalui perintah dan kebijakan. Ini menunjukkan bahwa wacana tidak hanya berbicara tentang kekuasaan, tetapi juga berpartisipasi dalam pelaksanaannya.
- 2) Ideologi:
- a) Ideologi Kerakyatan/Populis: Pidato ini sangat kental dengan ideologi populis, menempatkan "rakyat" sebagai subjek utama perjuangan dan penerima manfaat. Kemiskinan, stunting, dan ketidakadilan adalah masalah sentral yang diangkat untuk menarik simpati dan dukungan massa.
 - b) Ideologi Nasionalisme: Penekanan pada "Trisakti", "Bali tidak boleh dikuasai asing", "menghormati adat dan budaya lokal", dan "kesalahpahaman global tentang Indonesia" sangat mencerminkan ideologi nasionalisme yang kuat. Ini adalah upaya untuk memperkuat identitas

nasional dan mempertahankan kedaulatan dari pengaruh eksternal.

- c) Ideologi Pancasila: Penyebutan Pancasila, gotong royong, dan Bhinneka Tunggal Ika di akhir pidato berfungsi sebagai penegasan ideologi dasar negara sebagai landasan filosofis dan etis bagi seluruh perjuangan.
- 3) Pembentukan Identitas:
- a) Identitas "Pejuang Rakyat": Pembicara secara konsisten membangun identitasnya sebagai "pejuang sejati" yang gigih membela rakyat, bukan pencari kekuasaan semata. Pengalaman sebagai presiden kelima yang berhasil mengatasi krisis ekonomi dan melunasi utang IMF semakin memperkuat identitas ini.
 - b) Identitas Kader sebagai "Pekerja Keras": Kader partai didorong untuk mengadopsi identitas sebagai "pejuang sejati" yang turun ke lapangan, berlawanan dengan identitas "mejing" yang pasif. Ini adalah upaya untuk membentuk perilaku dan komitmen di internal partai.
 - c) Identitas Nasional yang Bangga: Wacana ini juga berupaya membentuk identitas nasional yang bangga akan budaya, kedaulatan, dan potensi bangsanya, serta kritis terhadap pengaruh asing yang negatif.

Identitas personal dan sosial yang melekat pada diri Megawati turut memengaruhi konstruksi wacana dalam pidato politiknya. Dalam pidato yang disampaikan, Megawati menampilkan dirinya tidak hanya sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan, tetapi juga sebagai putri dari Presiden pertama Republik Indonesia, seorang perempuan Jawa, dan figur keibuan. Identitas tersebut menjadi landasan dalam membentuk citra diri yang kompleks namun strategis (Pratiwi dan Rahmawati, 2023:125).

Megawati secara eksplisit menyampaikan karakteristik yang ingin ditonjolkan, yaitu cantik, pintar, kharismatik, dan berjiwa pejuang. Hal ini tercermin dari pernyataannya "Kalau aku mau selfie, oh, pasti pengikutku okeh 'banyak'. Kenapa? Satu, perempuan, dua cantik. He, baru dua aja udah ditepukin. Tiga, kharismatik. (Tepuk tangan) Empat, apa, neh 'lagi'? Pintar. (Tepuk tangan) Tahu-tahu, ketiban profesor aja, dua, doktor honoris causa sembilan. (Tepuk tangan) Masih nunggu neh 'lagi' lima karena pandemi. Aku dewe 'sendiri' sampai garuk-garuk kepala. Iki gara-gara apa, ta, ya. Terus, ini. Salah satu pengamat, apa iku namane ekonomi politik CNBC ngasih saya ini award. Kamu tahu nggak, sih, ibukmu ni udah pintar, cantik, kharismatik. (Tepuk tangan) Pejuang. Apa, neh 'lagi'? (Tepuk tangan).

Wacana Megawati menunjukkan bahwa kekuasaan direproduksi bukan hanya melalui tindakan politik konkret, tetapi juga melalui narasi, simbol, dan sejarah. Seperti disampaikan oleh Fairclough, bahasa menjadi alat ideologis untuk mempertahankan struktur sosial yang mendukung posisi dominan aktor tertentu. Megawati berhasil mereproduksi hegemoni sesuai dengan pendapat Fuchs dalam (Ikhsan, 2022:220), Teks sebagai produk hegemoni memiliki arti penguasaan dan kepemimpinan yang berujung pada proses hegemoni kelompok tertentu di bidang kebudayaan, politik, dan ekonomi.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pidato politik Megawati Soekarnoputri dalam acara Trisakti Tourism Award 2025 bukanlah sekadar komunikasi simbolik, melainkan merupakan representasi konkret dari praktik kekuasaan yang terstruktur dan strategis. Melalui pendekatan Analisis Wacana Kritis (AWK) model Norman Fairclough, dapat disimpulkan bahwa pidato Megawati berfungsi sebagai alat reproduksi kekuasaan yang menggabungkan dimensi tekstual, praksis diskursif, dan sosial secara simultan. Pada dimensi tekstual, Megawati menggunakan pilihan diksi, struktur kalimat, pronomina, dan gaya retorik untuk

menegaskan identitas politiknya serta membangun citra sebagai pemimpin yang bermoral dan ideologis. Pemilihan kata-kata seperti “warisan Bung Karno”, “moral”, dan “martabat bangsa” mencerminkan upaya untuk melegitimasi posisi politiknya melalui simbolisme nasionalistik dan sejarah.

Pada dimensi praksis diskursif, pidato ini diproduksi dalam konteks sosial-politik pasca-Pemilu 2024 yang penuh dengan ketegangan dan pertarungan kekuasaan. Wacana yang dibentuk tidak hanya menjadi media ekspresi personal, tetapi juga menjadi instrumen kolektif dari institusi politik seperti PDI-P. Penyampaian pesan melalui media massa juga memperkuat jangkauan serta resonansi politik dan ideologis pidato tersebut kepada publik luas.

Pada dimensi sosial, pidato ini berhasil merepresentasikan nilai-nilai ideologis yang hegemonik dan berpotensi memperkuat struktur sosial-politik yang sudah mapan. Megawati membingkai dirinya sebagai pemegang otoritas moral dan sejarah, serta secara implisit melakukan delegitimasi terhadap kelompok oposisi. Ia juga menggunakan posisinya sebagai satu-satunya presiden perempuan dalam sejarah Indonesia untuk menciptakan citra “ibu bangsa” yang mengandung kekuatan simbolik tersendiri dalam lanskap politik yang masih maskulin dan patriarkis.

Dengan demikian, penelitian ini mempertegas bahwa wacana politik, khususnya dalam pidato Megawati Soekarnoputri, merupakan arena utama dalam pembentukan relasi kekuasaan dan penyebaran ideologi. Analisis wacana kritis menjadi alat yang sangat relevan dan penting untuk mengungkap struktur dominasi yang tersembunyi di balik penggunaan bahasa politik. Temuan ini diharapkan dapat memperkaya literatur kajian wacana politik Indonesia dan mendorong kesadaran kritis masyarakat terhadap praktik-praktik simbolik kekuasaan yang berlangsung dalam ruang publik

DAFTAR PUSTAKA

- Angraini, D., & Permana, I. (2019). ANALISIS NOVEL “LAFAL CINTA” KARYA KURNIAWAN AL-ISYHAD MENGGUNAKAN PENDEKATAN PRAGMATIK. *Parole: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 2(4), 535-542.
- Ikhsan, Y. (2022). Pembingkai Citra Polisi pada Tagar# PercumaLaporPolisi (Analisis Wacana Kritis Metode Norman Fairclough). *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 9(2), 217-224.
- Irdiansyah, A. R. (2021). Reproduksi pengetahuan untuk kekuasaan: analisis wacana kritis pada artikel ilmiah dan pidato megawati soekarnoputri. *Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik Dan Komunikasi Bisnis*, 5(2), 223-237.
- Miranti, A., & Suidiana, Y. (2021). Pelecehan seksual pada laki-laki dan perspektif masyarakat terhadap maskulinitas (analisis wacana kritis norman fairclough). *Bricolage: Jurnal Magister Ilmu Komunikasi*, 7(2), 261-276.
- Pratiwi, F. N., & Rahmawati, A. (2023). Representasi Kekuasaan Megawati Soekarnoputri Dalam Pidato Politik Peringatan Hut Ke-50 Pdi-P. *Prosiding Konferensi Linguistik Tahunan Atma Jaya (KOLITA)*, 21(21), 119-131.
- Purba, A., Rahmadani, P., & Sari, S. (2024). Analisis Wacana Kritis Fairclough Dalam Teks Iklan Sprite 2024. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, 5(2), 2185-2191.
- Tarigan, A. J., Surif, M., Lubis, M., Ritonga, M. U., Hadi, W. (2023). Analisis Wacana Kritis Model Teun A. Van Dijk pada Teks Berita di Buku Bahasa Indonesia Kelas VII Berbasis Kurikulum Merdeka Terbitan Kemendikbud Ristek Tahun 2021. *Basastra: Jurnal Kajian Bahasa dan Sastra Indonesia*. 12(1). 217-224